

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada pasien, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Tujuan utama dikeluarkan standar tersebut adalah sebagai pedoman praktek apoteker dalam menjalankan profesi, melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional serta melindungi profesi dalam menjalankan praktek (DepKes RI, 2004).

Hasil penelitian tentang gambaran pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek pada tahun 2008 di Medan menunjukkan bahwa pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek dikota medan kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan 83,82% pelaksanaan pelayanan langsung kepada pasien di apotek dilakukan oleh AA dan 52,94% apoteker tidak hadir setiap hari di apotek (Ginting, 2009).

Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek di wilayah Purwokerto pada tahun 2010 menunjukkan bahwa pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian diapotek sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran apoteker maupun apoteker pendamping setiap hari diapotek serta peran aktif apoteker maupun apoteker pendamping dalam pelayanan kefarmasian diapotek menurut standar pelayanan kefarmasian (Tantomi, 2010).

Sedangkan penelitian gambaran pelaksanaan standard pelayanan kefarmasian di apotek DKI Jakarta tahun 2003 kurang baik, ditunjukkan dengan pelayanan obat bebas dan obat bebas terbatas 100% dilakukan oleh

AA dan Informasi obat untuk pelayanan swamedikasi yang meliputi informasi tentang indikasi, rute penggunaan, dosis dan frekuensi penggunaan, lamanya obat diminum, efek samping, interaksi, dan pantangan selama menggunakan obat hampir 90% dilakukan oleh AA. Hanya sekitar 10% apoteker yang ikut aktif dalam informasi pelayanan obat bebas (Purwati, *et al.*, 2004).

Contoh penelitian tersebut di atas menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian atau alat pengukur data. Instrumen penelitian memegang peranan penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, hal ini dapat dipahami karena instrumen penelitian berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data.

Instrumen penelitian harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas sehingga mampu memberikan informasi yang dapat dipercaya. Instrumen dikatakan valid berarti benar – benar mengukur apa yang hendak diukur. Contoh meteran sebagai alat yang valid untuk mengukur panjang, tetapi tidak valid digunakan untuk mengukur berat badan. Instrumen yang memenuhi persyaratan reliabilitas berarti instrumen menghasilkan ukuran yang konsisten walaupun instrumen tersebut digunakan mengukur berkali-kali digunakan untuk mengukur. Suatu instrumen penelitian yang memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang rendah sudah barang tentu kesimpulan dari pengujian hipotesis tersebut tidak tepat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang pembuatan kuesioner standar untuk menilai standar pelayanan kefarmasian di apotek.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuatan kuesioner penelitian
2. Bagaimana melakukan validitas dan reliabilitas instrument penelitian

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan informasi bagaimana pembuatan kuesioner
2. Dapat melakukan uji instrument penelitian yang memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang baik.

